



**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2013-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Rizkiadinda Chinta Cheppy Putri
022118122

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2022



**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hadiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013-2020**

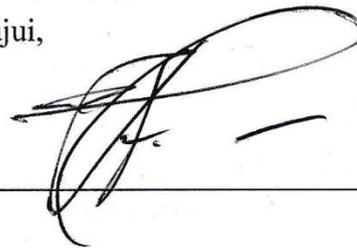
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis 28 Juli 2022

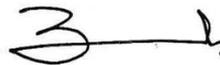
Rizkiadinda Chinta Cheppy Putri
022118122

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Monang Situmorang Drs.M.M.Akt.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Buntoro Heri Prasetya SE.,M.M.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sudjarmiko Wibowo, ST.,M.Ak.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkiadinda Chinta Cheppy Putri
NPM : 022118122
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA , KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2013-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 2022



Rizkiadinda Chinta C.P.
022118122

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RIZKIADINDA CHINTA CHEPPY PUTRI. 022118122. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020. Dibawah Bimbingan : BUNTORO HERI PRASETYA dan SUDJATMIKO WIBOWO. 2022.

Kinerja keuangan merupakan suatu tolak ukur pemerintah daerah dalam suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan yang bersumber dari kekayaan daerah yang hasilnya kemudian dikembalikan ke daerah tersebut baik untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat, sosial dan lingkungan daerah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan diuji oleh peneliti adalah sumber penting penerimaan daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi,

Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai PAD Kota Bogor pada periode anggaran 2013-2020 data yang digunakan bersumber dari website resmi Djpk Kemenkeu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif. Data diuji menggunakan SPSS versi 25. Uji analisis yang digunakan Analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Dana Perimbangan Tidak berpengaruh signifikan dan secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, Kinerja Keuangan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusia Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020” ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang memberikan semangat, bimbingan, doa dan dorongan dalam prosesn penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Cheppy Syukur dan ibunda tercinta Siti Tety Fatimah yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk saya, memberikan doa dan dukungan baik moril dan material serta selalu memberikan cinta dan kasih sayang.
3. Kakak-kakak terkasih, Rizkiananda Chinta Cheppy Putra dan Rizkiannisa Chinta Cheppy Putri yang selalu menghibur dan memotivasi saya.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si. CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Ibu Enok Rusmanah, SE.,M.Acc Selaku Wakil Dekan II Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
8. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetyo SE.,M.M. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sangat sabar memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Sujatmiko Wibowo, ST.,M.Ak. selaku Anggota Komisi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan saran selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan kemudahan atas fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta dan termaklum di kampus, Della Maulina N, Nurul Rizqia Utami, Syifa Amalina, Mega Putri N, Felicia Rascha dan Arini Utami Putri yang selalu memberikan waktu untuk menemani saya dalam menyelesaikan penelitian ini, menemani saya dari awal semester hingga akhir semester saya kuliah di Universitas Pakuan, dan selalu memaklumi Tindakan-tindakan tidak berguna saya dalam kehidupan pertemanan kami.
12. Teman-teman kelas D angkatan 2018, yang berjuang Bersama-sama selama perkuliahan.

13. Teman satu bimbingan Bapak Buntoro dan Bapak Sujatmiko yang sama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Demikian juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dengan tulus memberikan bantuan dan doa serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bogor, 28 Juli 2022

Rizkiadinda Chinta C.P

DAFTAR ISI

JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	v
LEMBAR HAK CIPTA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian	1
1.2.Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1.Identifikasi Masalah	7
1.2.2.Perumusan Masalah.....	7
1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1.Maksud Penelitian	7
1.3.2.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1.Kegunaan Praktis	8
1.4.2.Kegunaan Akademis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1.Konsep Akuntansi	9
2.1.1.Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.2.Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
2.2.1.Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2.2.Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	10
2.2.3.Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11

2.2.4.Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.3.Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.4.Pajak Daerah	13
2.4.1.Pengertian Pajak Daerah	13
2.4.2.Jenis-jenis Pajak Daerah	14
2.4.3.Fungsi Pajak Daerah	15
2.5.Retribusi Daerah	15
2.5.1.Pengertian Retribusi Daerah	15
2.5.2.Objek dan Subjek Retribusi Daerah	16
2.5.3.Jenis Retribusi Daerah	17
2.6.Dana Perimbangan	18
2.6.1.Pengertian Dana Perimbangan	18
2.6.2.Pembagian Dana Perimbangan	18
2.7 Penelitian Sebelumnya	19
2.8 Kerangka Pemikiran	27
2.8.1.Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	28
2.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	28
2.8.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan	29
2.9.Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1.Jenis Penelitian	31
3.2.Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	31
3.3.Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4.Operasional Variabel	31
3.5.Metode Penarikan Sampel	32
3.6.Metode Pengumpulan Data	33
3.7.Metode Pengolahan/Analisis Data	33
3.7.1.Statistik Deskriptif	33
3.7.2.Uji Asumsi Klasik	33
3.7.3.Analisis Regresi Berganda	35
3.7.4.Uji Hipotesis	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Kota Bogor	37
4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor	38
4.2. Hasil Pengumpulan Data	39
4.2.1. Deskripsi Data Penelitian	39
4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif	43
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	45
4.2.3.1. Uji Normalitas	45
4.2.3.2. Uji Multikolonieritas	46
4.2.3.3. Uji Autokorelasi	46
4.2.3.4. Uji Heteroskedastisitas	47
4.2.4. Analisis Regresi Berganda	47
4.2.5. Uji Hipotesis	49
4.2.5.2. Uji F (Uji Simultan)	50
4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	51
4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	51
4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	52
4.3.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Simpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Fenomena Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2013-2020	5
Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1. Operasional Variabel	32
Tabel 4.1. Kriteria penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal	40
Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Kota Bogor Tahun 2013-2020.....	40
Tabel 4.3. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013-2020.....	41
Tabel 4.4. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013-2020.....	42
Tabel 4.5. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013-2020.....	42
Tabel 4.6. Analisis Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolonieritas	45
Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
Tabel 4.11. Hasil Analisis Regresi.....	47
Tabel 4.12. Hasil Uji t (Parsial)	49
Tabel 4.13. Hasil Uji F (Simultan).....	50
Tabel 4.14. Hasil Kesimpulan Hipotesis.....	50
Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi R(Square)	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Presentase Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020	4
Gambar 2.1. Konstelasi Pemikiran	28
Gambar 4.1. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi	40
Gambar 4.2. Grafik Rasio Pajak Daerah.....	41
Gambar 4.3. Grafik Rasio Retribusi Daerah	42
Gambar 4.4. Grafik Rasio Dana Perimbangan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Periode 2013-2020	61
Lampiran 2 Perhitungan Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu Langkah strategis di Indonesia karena otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan di Indonesia diantaranya tidak meratanya pembangunan , rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan otonomi daerah juga berguna untuk memperkuat basis perekonomian daerah (Halim,2020). Aspek pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tentunya dibutuhkan pendanaan yang memadai. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendanaan di daerah. Permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh daerah adalah potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di setiap daerah berbeda-beda sehingga masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

Laporan Keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan. (Mahmudi,2011). Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang baik yang dapat dinilai menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Mahmudi,2006). Sumber-sumber keuangan daerah dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu PAD, pendapatan yang berasal dari pusat, dan pendapatan lain-lain dari daerah yang sah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu ukuran yang dijadikan indikator keuangan dalam memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, serta untuk menilai tingkat pencapaian hasil kerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Kolang & Ketut, 2019). Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Salah satunya menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu total

pendapatan asli daerah per total penerimaan daerah. Pengukuran kinerja keuangan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Komang & Ketut, 2019). Baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sari (2016) dan Rustiyaningsih & Immanuela (2014) besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD menunjukkan bahwa daerah mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada, sehingga memperkecil ketergantungan dana dan memperbaiki infrastruktur yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Wan, 2013). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

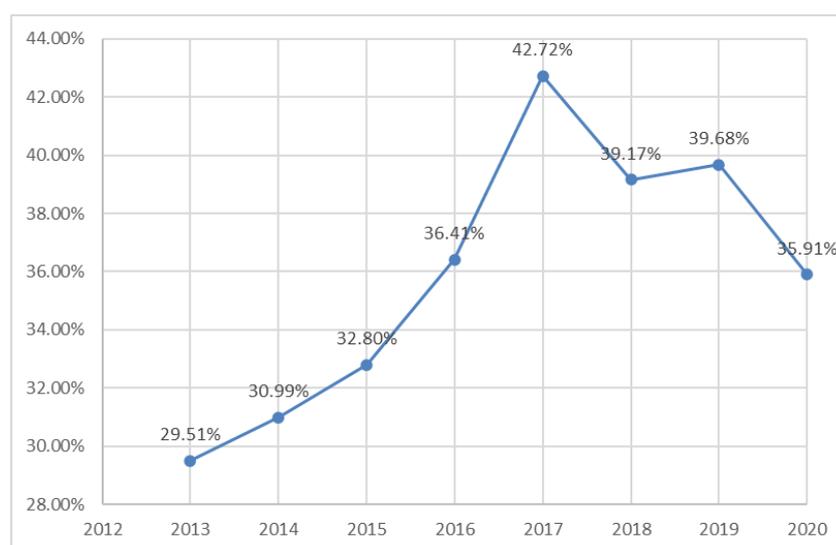
Definisi Pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dan utama dari PAD. Pajak Daerah bersumber dari berbagai jenis pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hal atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan Pajak Daerah suatu daerah tinggi atau mengalami peningkatan sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Sumber penting PAD lainnya adalah Retribusi daerah, menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, apabila Retribusi Daerah suatu daerah tinggi atau mencapai target, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Selain PAD, Dana perimbangan juga merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, hal ini membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor dapat diketahui dengan pengukuran kinerja keuangan yaitu salah satunya melalui Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal tinggi, diharapkan akan menjadi daerah yang maju dan semakin berkembang. Sebaliknya, daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal rendah akan tertinggal dalam pembangunan daerahnya dan perlu adanya upaya dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sari, 2017).

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan daerah dapat dilihat dari analisis rasio derajat desentralisasi yang dapat dikategorikan seperti, apabila presentase derajat desentralisasi diantara 0,00%-10,00% berarti termasuk kategori sangat kurang, 10,01%-20,00% termasuk kategori kurang, 20,01%-30,00% termasuk kategori sedang, 30,01%-40,00% termasuk kategori cukup, 40,01%-50,00% termasuk kategori baik dan apabila lebih dari 50,00% termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2013-2020 terdapat fenomena antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, sebagai berikut:



Sumber: djpk kemenkeu Kota Bogor (data diolah)

Gambar 1.1 Grafik Presentase Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020.

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 2013-2020 mengalami fluktuasi, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 42,72% pada tahun ini kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dapat dikategorikan dalam kondisi Baik, dan mengalami penurunan terendah pada tahun 2013 dengan presentase sebesar 29,51% yang dapat dikategorikan Sedang. Sehingga dapat disimpulkan dengan rata-rata presentase kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor pada periode 2013-2020 dapat dikategorikan dalam kondisi Cukup dengan presentase kinerja keuangan diantara 30,01%-40,00%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah ini dihitung dengan menggunakan perhitungan rasio derajat desentralisasi yang diperoleh dari hasil Realisasi Pendapatan Asli daerah dibagi dengan Realisasi Pendapatan Daerah.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Tahun 2013-2020

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Derajat Desentralisasi
2013	341.419.704.885	73.636.737.984	792.975.350.762	29,51%
2014	376.487.551.008	77.167.650.951	855.645.928.015	30,99%
2015	398.435.398.328	46.219.894.849	814.953.434.916	32,80%
2016	492.138.653.391	62.727.631.456	1.097.614.311.436	36,41%
2017	555.475.409.588	49.043.299.929	1.072.486.473.770	42,72%
2018	592.978.746.862	48.418.070.315	1.066.762.734.201	39,17%
2019	689.543.006.040	51.362.153.192	1.106.494.405.814	39,68%
2020	509.039.468.746	35.010.375.259	1.083.171.964.899	35,91%

Sumber : djpk kemenkeu (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2020 Pajak Daerah mengalami peningkatan yang stabil sampai dengan tahun 2019. Pada periode ini jika dihubungkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2018 Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp555.475.409.588,00 yang kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp592.978.746.862,00 Sedangkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor justru mengalami penurunan pada periode yang sama dimana pada tahun 2017 memiliki presentase kinerja keuangan sebesar 42,72% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 39,17% ditahun 2018. Pada tahun 2018 Pajak Meningkat namun

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah justru mengalami penurunan. Secara teori yang dinyatakan oleh Alfarisi (2015) bahwa semakin tinggi pendapatan pajak daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dikatakan terdapat perbedaan antara fenomena dengan teori yang telah dicantumkan.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat untuk Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Pada tahun 2016-2018 Retribusi Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya kemudian mengalami peningkatan kembali ditahun 2019, dimana pada tahun 2018 pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp48.418.070.315,00 dan meningkat menjadi Rp51.362.153.192,00 ditahun 2019, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 turun menjadi Rp35.010.375.259,00. Sedangkan jika dihubungkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2018 mengalami penurunan dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019 Retribusi Daerah mengalami peningkatan dan Kinerja Keuangan mengalami Peningkatan dan pada tahun 2020 Retribusi Daerah mengalami penurunan dan Kinerja Keuangan mengalami penurunan. Secara teori dinyatakan Apridiyanti (2019) bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah maka akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena Retribusi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2018-2020. Karena fakta yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang dicantumkan.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat untuk Dana Perimbangan mengalami fluktuasi, pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan terjadi peningkatan pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 Dana Perimbangan Kota Bogor sebesar Rp1.066.762.734.201,00 kemudian meningkat menjadi Rp1.106.494.405.814,00 pada tahun 2019, namun mengalami penurunan kembali menjadi Rp1.083.171.964.899,00 pada tahun 2020. Jika dihubungkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan Dana Perimbangan mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami penurunan dan Dana Perimbangan mengalami penurunan. Secara teori dinyatakan Anggreni & Artini (2019) bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2018-2020. Karena fakta yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang dicantumkan.

Fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor terdapat perbedaan atas fenomena di atas dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya adalah Hasil penelitian Alfarisi (2015) telah meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Sumatera Barat, artinya semakin besar penerimaan pajak daerah maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Begitu pula dengan penerimaan Retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Sejalan dengan penelitian Sari (2017) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Apridiyanti (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh negative secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi ketidak konsistenan pada hasil penelitian terdahulu lainnya yang tidak sejalan.

Menurut hasil penelitian dari Anggreni & Artini (2019) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Artinya semakin tinggi Dana Perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah menurun namun tidak signifikan mempengaruhi. Sejalan dengan hasil penelitian Fernandes & Hilwani (2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Muhayanah (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali.

Penelitian yang peneliti lakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarisi H (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Penelitian ini dilakukan dengan objek laporan realisasi APBD Kota Bogor sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan dengan objek laporan realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian terdahulu memiliki tahun amatan antara tahun 2008-2012, sedangkan dalam penelitian ini memiliki tahun amatan antara tahun 2013-2020. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam menggali potensi dan sumber keuangan yang dimiliki daerah sendiri dalam membiayai segala urusan daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik diperlukan penelitian dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis sumber pendapatan asli daerah demi meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul sebagai berikut : **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2013-2020”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa saat ini penerimaan pendapatan transfer atau dana perimbangan yang masih tinggi dalam pendapatan daerah Kota Bogor. Diketahui bahwa Pajak Daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mengalami fluktuasi begitu juga dengan derajat desentralisasi fiskal yang juga mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan ketidak konsistenan antara peningkatan PAD dan Dana Perimbangan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Hal ini berpengaruh pada peningkatan dan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk periode anggaran 2013-2020.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mengemukakan perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bogor ?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan/hubungan secara parsial di antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2013-2020.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2013-2020.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2013-2020.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bogor periode 2013-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, serta menyediakan sarana dan prasarana public yang layak untuk masyarakat.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Secara teoritis tujuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu Akuntansi khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik tentang bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kota Bogor dilihat dari segi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik digunakan untuk transparansi kepada publik untuk dapat memenuhi hak-hak publik. Sektor public adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang lebih kompleks mulai dari Lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan Lembaga non- pemerintah, badan usaha milik negara, rumah sakit, dan Lembaga Pendidikan. Menurut Mardiasmo (2018) Akuntansi sektor public terkait dengan tiga hal pokok, yaitu Penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor public merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Menurut Yuesti (2017) dalam Hantono, dkk (2021) pembagian jenis-jenis akuntansi sektor publik di antaranya :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat

Akuntansi pemerintah pusat merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

2. Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi Pemerintah daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah, seperti provinsi, kota atau kabupaten. *Outputnya* dapat berupa laporan keuangan daerah yang ditujukan ke pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Kreditor, investor, donator, dan pihak berkepentingan lainnya.

2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 37 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan menurut (Bastian, 2005) memaparkan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang dijadikan indikator keuangan dalam memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016). Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tolak ukur pemerintah daerah dalam suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan yang bersumber dari kekayaan daerah yang hasilnya kemudian dikembalikan ke daerah tersebut baik untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat, sosial dan lingkungan daerah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Dengan pengukuran kinerja memungkinkan untuk mengkomunikasikan strategi lebih baik dan lebih tepatnya dalam mencapai strategi yang telah di terapkan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2018) mengidentifikasi tujuan pengukuran kinerja sektor publik, yaitu :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja *financial* dan *non financial* secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*; dan
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja keuangan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, pencapaian prestasi

atau keberhasilan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber keuangan daerah dan bagaimana mengalokasikan untuk melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dilihat dari pencapaian anggaran daerah dengan tingkat realisasinya (Wiguna & Jati, 2019).

2.2.3. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2005) pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*). Yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dan, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018) peran indikator kinerja bagi pemerintah, antara lain:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi;
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan;
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial;
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan;
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja;
- f. Untuk menunjukkan efektivitas;
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran dan;
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu. Factor-faktor yang

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan diuji oleh peneliti adalah sumber penting penerimaan daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, *debt service coverage ratio*, rasio utang terhadap pendapatan daerah dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi, yaitu dihitung berdasarkan perbandingan anatar jumlah PAD dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2011). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2011), rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menyebutkan bahwasanya relasi agensi ialah suatu perjanjian (kontrak) di antara 2 (dua) pihak yakni gen dan principal, yang mana prinsipal memberikan otoritas dan kepercayaannya kepada agen, yang mana principal memberi otoritas dan kepercayaannya kepada agen, yang mana principal memberi otoritas dan kepercayaan pada agen dalam mengambil ketentuan mengatasnamakan principal (Jensen & Meckling, 1976). Relasi yang muncul sebab terdapat perjanjian yang diterapkan oleh legislative menjadi wakil daripada rakyat (principal) yang mewajibkan pihak pemerintah/eksekutif (agen) menjadi penyedia jasa demi kepentingan rakyat. Terdapatnya tujuan yang berbeda diantara agen dan *principal* dapat memunculkan permasalahan agensi. *Agency Theory* menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu pemberi wewenang disebut sebagai *principal* dengan pihak yang menerima wewenang disebut sebagai agen yang bertugas mengurus penggunaan dan pengendalian wewenang tersebut. Dalam pemerintahan yang dimaksudkan tentang teori keagenan adalah mengenai hubungan *principal* dengan *agent*. Dalam hubungan tersebut *principal* (misalnya rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaannya kepada *agent* (misalnya pemerintah daerah/ gubernur/ bupati/ walikota) (Halim & Kusufi, 2012).

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi pada penelitian ini dapat ditinjau dari hubungan antara pemerintah daerah selaku agen yang diberikan wewenang untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan neara, penggunaan dana tersebut dilaporkan kepada DPRD/DPD/DPRD mewakili rakyat sebagai pihak prinsipal yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah

sekaligus pemerintah daerah melaksanakan fungsi akuntabilitasnya dengan melaporkan tanggungjawabnya.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah. Dana perimbangan dalam teori keagenan menggambarkan pemerintah pusat mempercayakan kepada agen dalam pengelolaan dana yang dialokasikan ke daerah untuk melakukan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan yang menyeluruh, dan pemerintah daerah perlu menyajikan laporan sebagai gambaran bahwa dana diterima dan dikelola dengan baik hingga akhirnya akan mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Meningkatnya dana dari pusat ke daerah akan meningkatkan pemantauauan yang lebih besar lagi (Aswar, 2019).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang didapatkan sendiri berdasar pada peraturan daerah dan selaras terhadap hukum yang diterapkan. PAD dalam teori keagenan yaitu dana atau penghasilan seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dari masyarakat ataupun *stakeholder* selaku *principal* kepada pemerintah daerah selaku agen, dimana pemerintah daerah melakukan pengelolaan atas sumber daya ekonomi yang didapat dengan baik guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang Ketika melakukan tata Kelola keuangan dari masyarakat yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dari itu masyarakat dapat melakukan kontrol atas tata Kelola keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam teori keagenan, agen diberikan kepercayaan oleh prinsipal dalam hal mengelola sendiri kewenangan yang telah diberikan oleh prinsipal. Di dalam teori ini ada beberapa perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang memunculkan konflik antara mereka. Untuk dapat mengatasi konflik tersebut teori keagenan berperan penting dalam hal tersebut.

2.4. Pajak Daerah

2.4.1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi yang diberikan individu dan organisasi kepada pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membangun daerah. Menurut Nggilu,dkk (2016) Pajak Daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.4.2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas :
 - a. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d. PAP atau Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4.3. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana kita ketahui, pajak sangat penting perannya di dalam pembangunan Daerah. Banyak hal yang bisa dibiayai pajak seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, jaminan Kesehatan masyarakat (jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.

Hal yang perlu dicermati adalah suatu anggaran pemerintahan daerah dianggap sehat jika anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada anggaran rutin (gaji pegawai). Setiap pemerintah daerah tentu berharap bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak daerah.

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial, seperti Pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Pada akhirnya pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011) mempunyai 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi finansial (*Fungsi Budgeter*)
Fungsi yang terdapat di sektor public dan pajak disini sebagai sumber dana bagi pemerintah yang didapat dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Fungsi Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.5. Retribusi Daerah

2.5.1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak atas oembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah erupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal in terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Menurut Nggilu,dkk (2016) Retribusi daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.5.2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan, bahwa Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuam kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan.

Subjek Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.5.3. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Jenis Retribusi jasa umum terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi pergantian biaya cetak KTP
 - d. Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
 - e. Retribusi pelayanan pemakaman, dan pengabuan mayat
 - f. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - g. Retribusi pelayanan pasar
 - h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - j. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - k. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - n. Retribusi pelayanan Pendidikan
 - o. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Jenis Retribusi jasa usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parker
 - f. Retribusi tempat penginapan/ persanggarahan/villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyeberangan di air
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Jenis Retribusi perizinan tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

2.6. Dana Perimbangan

2.6.1. Pengertian Dana Perimbangan

Dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (Sari, 2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan (Julitawati, dkk 2012).

Menurut Halim (2020) Dana Perimbangan adalah salah satu pendapatan daerah dalam pendapatan transfer pada transfer pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi daerah, Dana Perimbangan mencerminkan upaya dan asas keadilan perimbangan antara pusat dan daerah, selain upaya dan asas pemerataan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah-daerah.

2.6.2. Pembagian Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Perimbangan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain :

a. Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dua jenis, yaitu :

1) Dana bagi hasil pajak, meliputi :

- a) Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
- c) Bagi hasil dari pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pihak orang pribadi pasal 21

2) Dana bagi hasil sumber daya alam, berasal dari :

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan Umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan minyak dan bumi
- e) Pertambangan gas bumi
- f) Pertambangan panas bumi

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada Pasal 7 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dari 90 persen DAU.

c. Dana Alokasi Khusus

Pengertian dana alokasi khusus menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu :

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk pembiayaan kebutuhan daerah guna keberlangsungan pembangunan daerah, pertumbuhan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah menandakan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendanai pembiayaan daerahnya sendiri sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut belum cukup baik. Menurut Maiyora (2015) Dana Perimbangan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.7 Penelitian Sebelumnya

2.7.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ebit Julitawati, Darwanis,	Variabel Dependen	- Pajak Daerah	Metode penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Jalaludin (2012)</p> <p>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI ACEH</p>	<p>- Pendapatan Asli Daerah</p> <p>- Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p>	<p>Retribusi Daerah</p> <p>- Dan Lain-Lain PAD yang Sah</p> <p>- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>- DAU</p> <p>- DBH</p> <p>- DAK</p> <p>- Rasio Keuangan</p>	<p>dengan populasi dan sampel.</p> <p>Metode Analisis dengan Analisis regresi linear berganda.</p>	<p>dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.</p> <p>Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh.</p>
2.	<p>Wan Vidi Rukmana (2013)</p> <p>PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>- Pajak Daerah</p> <p>- Retribusi Daerah</p> <p>- Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p>	<p>- Pajak Daerah</p> <p>- Retribusi Daerah</p> <p>- DAU</p> <p>- DAK</p> <p>- DBH</p> <p>- Rasio Keuangan</p>	<p>Metode Analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik yang digunakan : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas</p>	<p>Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau.</p> <p>Secara parsial Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau.</p> <p>Secara Parsial variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau.</p> <p>Secara simultan variabel pajak</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Salman Alfarisi H (2015) PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT)	Variabel Independen : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dana Perimbangan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - DAU - DAK - DBH - Rasio Keuangan	Metode Penelitian Kausatif Metode Analisis regresi dengan dilakukan terlebih dahulu Analisis Deskriptif dengan pengujian meliputi : Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi	Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Swastika Enjang Prasasti (2015) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DIY TAHUN 2007-	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - DAU - DBH - DAK - Rasio Keuangan	Metode Penelitian Populasi dan Sampel dengan Teknik pengambilan sampel <i>non-probability sampling</i> dengan cara <i>purposive sampling</i> . Metode analisis regresi linier.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	2013)				<p>Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.</p> <p>Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.</p>
5.	<p>Gita Maiyora (2015)</p> <p>PENGARUH KARAKTERIS TIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (STUDI EMPIRIS KABUPATEN/ KOTA DI PULAU SUMATERA)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>- Karakteristik pemerintahan Daerah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>- Kinerja Keuangan</p>	<p>- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan (<i>size</i> pemerintah daerah, kemakmuran, ukuran legislative, <i>leverage</i>, <i>interdovermental revenue</i>)</p>	<p>Metode Penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif Populasi dan sampel dengan Teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>.</p> <p>Metode Analisis regresi linier berganda.</p>	<p><i>size</i> pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.</p> <p>kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p> <p>Ukuran legislative tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p><i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	- Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			-		<i>intergovernmental revenue</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2016) PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI GORONTALO	Variabel Independen : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Analisis regresi linier berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.
7.	Renita Novita Sari (2017) PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel Independen : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Belanja Modal Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Belanja tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan, - Belanja Jalan,	Metode Penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif Populasi dan sampel dengan Teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i> . Metode	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015 sedangkan Belanja Modal

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013-2015		<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi dan Jaringan, - Belanja Aset Lainnya - Rasio Keuangan 	Analisis regresi linier berganda.	<p>tidak berpengaruh.</p> <p>Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.</p>
8.	<p>Komang Aryagus Wiguna & I Ketut Jati (2019)</p> <p>PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah - Rasio Keuangan 	<p>Metode Penelitian kuantitatif.</p> <p>Metode Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Pajak Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016.</p> <p>Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016.</p> <p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Provinsi Bali tahun 2012-2016.
9.	<p>Ajeng Apridiyanti (2019)</p> <p>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT 2013-2017</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Rasio Keuangan 	<p>Metode penelitian Desain Kausal</p> <p>Metode Analisis statistik, data yang diolah diuji dengan uji asumsi klasik dan menggunakan Teknik regresi berganda.</p>	<p>Pajak daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Retribusi Daerah berpengaruh negative secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh negative secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>PAD secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di jawa barat tahun 2013-2017</p>
10.	Ni Ketut Ayu Anggreni & Luh Gede Sri Artini (2019)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain- 	Metode Analisis regresi linier berganda.	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI	<ul style="list-style-type: none"> - Perimbangan - Belanja Modal <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lain PAD yang Sah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - DBH - DAU - DAK - Belanja tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan, - Belanja Jalan, - Irigasi dan Jaringan, - Belanja Aset Lainnya - Rasio Keuangan 		<p>terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Belanjamodal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. "</p>
11.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira (2021) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Belanja Modal - Ukuran Pemerintah Daerah <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - DBH - DAU - DAK - Belanja tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja 	<p>Metode Penelitian Kuantitatif</p> <p>Metode Analisis menggunakan analisis regresi berganda</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang</p>

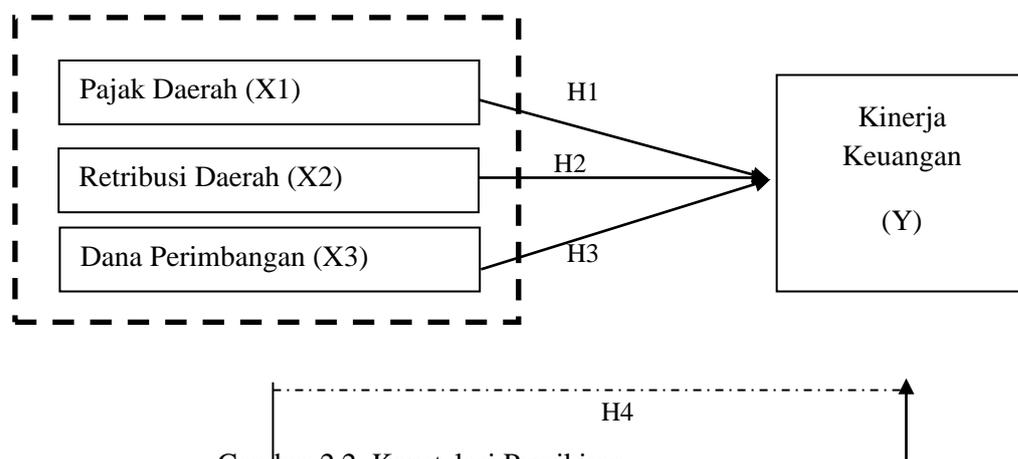
No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	- Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	PEMERINTAH DAERAH		<ul style="list-style-type: none"> - Gedung dan Bangunan, - Belanja Jalan, - Irigasi dan Jaringan, - Belanja Aset Lainnya - Total Aset Pemerintah Daerah - Rasio Keuangan 		signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
12.	Berti Indah Sari, Halmawati (2021) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Daerah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dan Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Pendapatan APBN - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung - Rasio Keuangan 	Metode Penelitian Kuantitatif dengan statistic deskriptif. Metode Analisis regresi berganda.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel penelitian terdahulu di atas relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya adanya persamaan variabel dependen dan variabel independent seperti judul yang sama dengan penelitian Wan Vidi Rukmana (2013), Salman Alfarisi H (2015) dan Renita Novita Sari (2017). Judul yang sejenis dengan penelitian Ebit Julitawati, dkk (2012), Swastika Enjang (2015), Komang Aryagus & I Ketut (2019), Ajeng Apridiyati (2019), Ni Ketut Ayu Anggreni & Luh Gede Sri Artini (2019), Afia Maulina, dkk (2021), dan Berti Indah Sari, Halmawati (2021).

Persamaan lainnya terdapat pada metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis regresi berganda dengan data kuantitatif yaitu data *time series*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor. Perbedaan lainnya yaitu periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode anggaran Tahun 2013-2020.

2.8. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan melihat pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah kota Bogor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang utama antara lain, penerimaan daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut pengembangan hipotesis terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.2. Konstelasi Pemikiran

Dari konstelasi pemikiran di atas akan menjelaskan dan membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y), pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y), pengaruh Dana Perimbangan (X3) terhadap kinerja keuangan (Y), dan pengaruh Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) dan Dana Perimbangan (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan (Y).

Berikut pengembangan hipotesis dari konstelasi pemikiran di atas:

2.8.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penerimaan daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) unsur penting PAD yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah Pajak daerah dan Retribusi Daerah, apabila pajak daerah yang diterima semakin tinggi maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila semakin banyak

masyarakat yang sadar akan membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Menurut penelitian sebelumnya Alfarisi (2015) menyatakan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan sehingga pajak daerah dapat menunjang peningkatan Kinerja Keuangan daerah.

2.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.

Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan penerimaan daerah yang merupakan unsur penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi kinerja keuangan. Retribusi daerah dikenakan atas berbagai jasa dan perizinan yang dikhususkan pemerintah bagi kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah ini merupakan pendukung kegiatan perekonomian suatu daerah karena sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Retribusi daerah yang dipungut dari orang pribadi atau badan memberikan berbagai jenis jasa yang memberikan manfaat langsung dan bentuk-bentuk perizinan tertentu sebagai sarana pendukung tertentu yang dapat dirasakan manfaatnya.

Menurut penelitian sebelumnya Alfarisi (2015) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Florida (2007) Komponen PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Utara.

2.8.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.

Penerimaan daerah lainnya adalah Dana Perimbangan, dalam penelitian ini dana perimbangan didukung dengan teori keagenan dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan kesejahteraan untuk public. Masalah agensi akan muncul apabila tingginya dana perimbangan yang diberikan tidak dibarengi dengan meningkatnya PAD. Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan pelayanan kepada publik. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat maka akan mempengaruhi semakin meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Penelitian sebelumnya Rukmana (2013) menunjukkan secara parsial maupun simultan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka apabila dihubungkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tinggi penerimaan dana perimbangan maka semakin semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2.9. Hipotesis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen, variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen yang digunakan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tercantum pada tinjauan Pustaka bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut hipotesis terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H1: Pajak Daerah berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun anggaran 2013-2020.
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020.
- H3 : Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020.
- H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Verifikatif yaitu, metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel atau untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori hasil penelitian terdahulu. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2013 sampai 2020. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan sebagai Variabel Independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Dependen. Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *Geographic Region* yaitu, data yang diteliti berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Lokasi penelitian yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, tetapi diperoleh dari penyedia data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor yakni Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2013 sampai 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.4. Operasional Variabel

Tabel 3.1. Operasional Variabel dari “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020”

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen Pajak Daerah (X1)	Pajak Kabupaten/Kota	$PD = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Independen Retribusi Daerah (X2)	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	$RD = \frac{\text{Total Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Independen Dana Perimbangan (X3)	1. Dana Bagi Hasil (DBH) 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus	$DP = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Dependen Kinerja Keuangan (Y)	Rasio Derajat Desentralisasi	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020 yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu, pengambilan sampel terbatas pada jenis tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang konsisten dan representative, sesuai dengan kriteria-kriteria yang digunakan.

Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor tersebut memiliki data yang lengkap dan diperlukan dalam proses penelitian selama tahun pengamatan.
3. Laporan Keuangan empat tahun terakhir yang memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan. Penelitian dengan metode kepustakaan dilaksanakan peneliti dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengkaji buku-buku referensi, mengunduh *e-book*, jurnal internasional, jurnal penelitian terkait, dan situs-situs yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data tersebut diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan periode anggaran 2013-2020.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan anatar variabel independen dengan variabel dependen.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Menurut Sudana & Setianto (2018) Pada analisis statistic deskriptif akan disajikan berbagai indicator mengenai karakteristik data. Indikator itu dapat berupa rata-rata(*mean*), *median*, modus, varians, deviasi standar, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistic yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linear berganda. Untuk mendapat hasil yang sesuai dengan persyaratan uji asumsi klasik maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan agar pengujian apa didalam model regresi variabel terikat serta variabel bebas memiliki distribusi normal ataupun tidaknya (Anggreni & Artini, 2019). Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara Analisis statistik, dalam melakukan analisis statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov test* dalam program SPSS. Uji ini dapat dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual terdistribusi normal ($H_0 > 0,05$)

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal ($H_a < 0,05$)

H_0 yang artinya data berdistribusi normal memiliki nilai probabilitas diatas alpha 5% artinya jika angka probabilitas < alpha 5% maka H_0 tidak berdistribusi normal, dan

sebaliknya jika angka probabilitas $>$ alpha 5% maka H_a ditolak yang artinya data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2018). Dalam mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random* atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2018).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak sama dengan nol (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $>$ 0,1 atau sama dengan nilai VIF $<$ 10, berarti tidak terdapat masalah multikolonieritas. Namun jika nilai *tolerance* \leq 0,10 atau VIF \geq 10 maka terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance pada residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu:

1. Jika terlihat pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudia menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *Spearman-rho* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independent terhadap nilai absolut dari residual hasil regresu. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel inpenden dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varians dari residual tidak homogen) (Ghozali, 2018).

3.7.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Anggreni & Artini, 2019). Persamaan regresi berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi masing-masing variabel
- X_1 = Pajak Daerah
- X_2 = Retribusi Daerah
- X_3 = Dana Perimbangan
- ε = error

3.7.4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Berikut adalah uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2013). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual atau masing-masing dalam menerangkan variabel dependen, pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2013). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perbandingan thitung dengan ttabel, dasar pengambilan keputusannya yaitu:
 - a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Berdasarkan nilai Probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan :
 - a) Jika $t_{sig} < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - b) Jika $t_{sig} > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Perumusan hipotesis terkait pengujian variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_0: b_1 = 0$, pajak daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_a: b_1 \neq 0$, pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_0: b_2 = 0$, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_a: b_2 \neq 0$, retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Variabel Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_0: b_3 = 0$, dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 $H_a: b_3 \neq 0$, dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan secara simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data SPSS Statistik Parametrik (Ghozali, 2013) sebagai berikut:

1. Jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
2. Jika probabilitas $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan. Nilai probabilitas dari uji F dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig .

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedududukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT

4.1.1. Sejarah Kota Bogor

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang. Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Pajajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspidisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh *Scipio* dan *Riebeck* pada tahun 1687, dan mereka meneliti Prasasti Batutulis dan situs-situs lainnya yang meyakini bahwa di Bogorlah terletak pusat Pemerintahan Pakuan Pajajaran.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu bernama *Baron Van Inhoff* membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkejakan seorang *Planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79).

Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 Kabupaten (*Regentscape*) dan Kotapraja (*Stads Gemeente*), dimana *Buitenzoorg* (Bogor) salah satu *Stads Gemeente* di Propinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan *Burgermeester* menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya yaitu: Keresidenan menjadi *Syoeoe*, Kabupaten/*Regentschaps* menjadi *ken*, Kota/*Stads Gemeente* menjadi *Si*, Kewedanaan menjadi/Distrik menjadi *Gun*, Kecamatan/*Under Districk* menjadi *Soe* dan desa menjadi *Koe*.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi Kota Bogor

"Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan Pemerintahan Amanah"

Misi Kota Bogor

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan.
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan sebagai Variabel Independen dan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Dependen. Data yang digunakan sebagai objek penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020. Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *Geographic Region* yaitu, data yang diteliti berupa wilayah atau daerah tertentu. Lokasi penelitian yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bogor di Jl.Ir.H. Juanda No.10, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122.

Penelitian ini menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020 yang diperoleh dari *website* resmi DJPK kemenkeu dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel terbatas pada jenis tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020.

4.2.1. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPR RI) pada periode 2013 sampai dengan 2020. Dalam penelitian ini, Kinerja Keuangan merupakan variabel dependen sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan merupakan variable independen.

4.2.1.1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan, pada dasarnya analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja keuangan masa lalu dengan melakukan beberapa analisa sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Dalam penelitian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor adalah Rasio Derajat Desentralisasi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total Pendapatan Daerah. Adapun sebagai kriteria untuk melihat kemampuan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
0.00%-10.00%	Sangat Kurang
10.01%-20.00%	Kurang
20.01%-30.00%	Sedang
30.01%-40.00%	Cukup
40.01%-50.00%	Baik
>50.00%	Sangat Baik

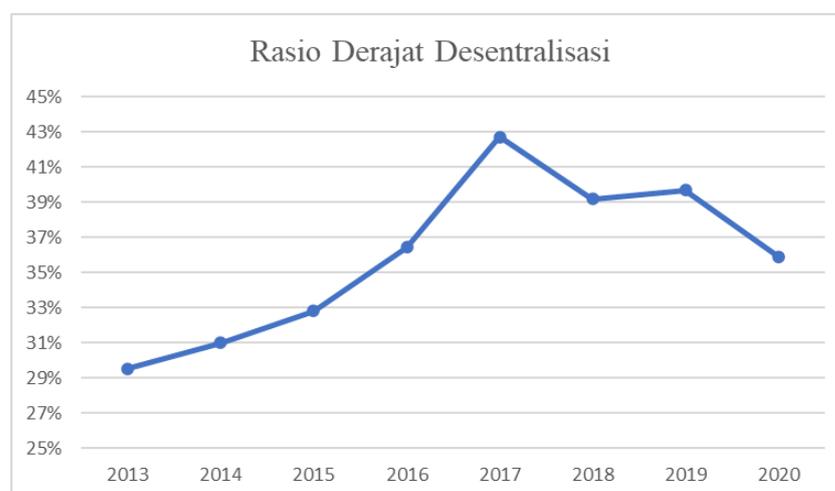
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Arnaldi (2020)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor tahun 2013-2020. Berikut kondisi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi.

Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi
2013	464.695.880.485	1.574.372.008.958	29,51%
2014	544.835.708.254	1.757.697.381.840	30,99%
2015	627.597.050.141	1.913.210.404.036	32,80%
2016	783.873.587.219	2.152.370.082.886	36,41 %
2017	978.197.741.947	2.289.359.362.675	42,72 %
2018	912.197.971.289	2.328.703.432.669	39,17 %
2019	1.015.884.216.920	2.559.857.207.794	39,68 %
2020	872.017.242.152	2.428.579.503.649	35,91 %

Sumber: Data sekunder (Data diolah)



Gambar 4.1. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 42,72% pada tahun ini kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dapat dikategorikan dalam kondisi Baik, dan mengalami penurunan terendah pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 30,99% yang dapat dikategorikan Cukup. Sehingga dapat disimpulkan dengan rata-rata presentase kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor pada periode 2013-2020 dapat dikategorikan dalam kondisi Cukup dengan presentase kinerja keuangan diantara 30,01%-40,00%.

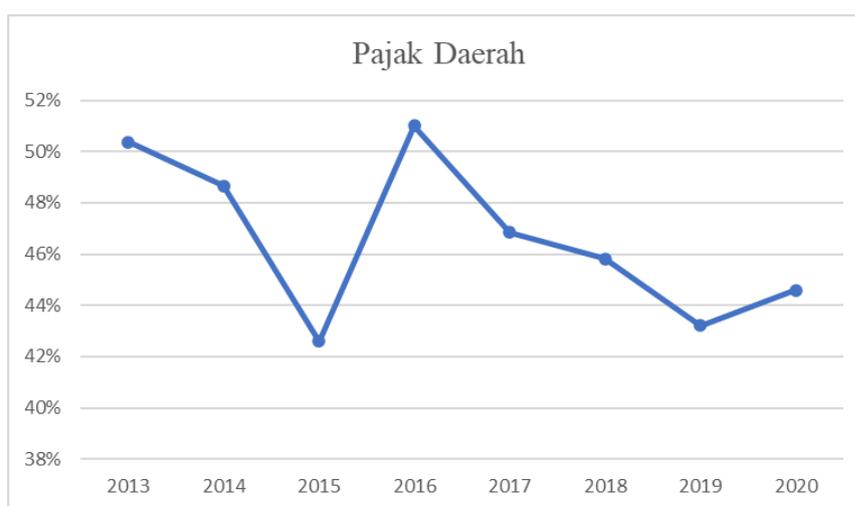
4.2.1.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah diukur dari realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor. Berikut data perhitungan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013-2020 :

Tabel 4.3. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013-2020

Tahun	Pajak Daerah	Total Pendapatan Daerah	%
2013	341.419.704.885	1.574.372.008.958	21,68
2014	376.487.551.008	1.757.697.381.840	21,41
2015	398.435.398.328	1.913.210.404.036	20,82
2016	492.138.653.391	2.152.370.082.886	22,86
2017	555.475.409.588	2.289.359.362.675	24,26
2018	592.978.746.862	2.328.703.432.669	25,46
2019	689.543.006.040	2.559.857.207.794	26,93
2020	509.039.468.746	2.428.579.503.649	20,96

Sumber : djpk kemenkeu (Data Diolah)



Gambar 4.2. Grafik Rasio Pajak Daerah

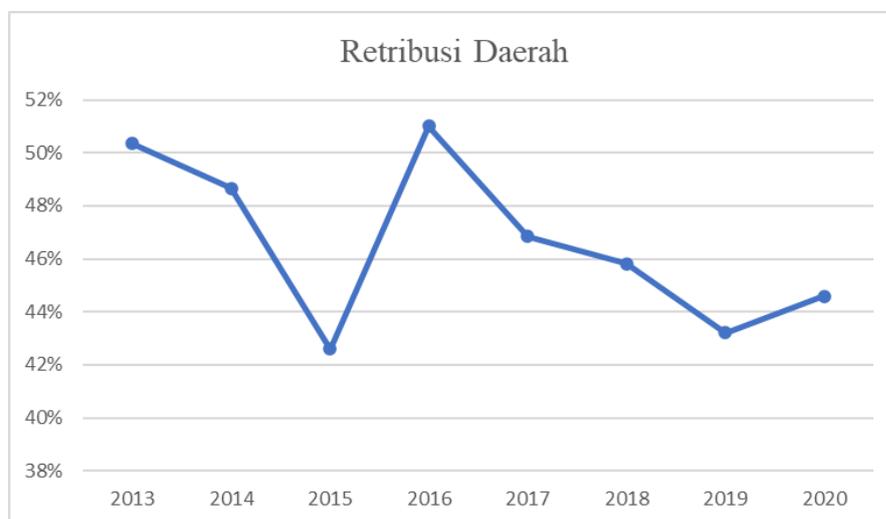
4.2.1.3. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi daerah diukur dari realisasi retribusi daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor. Berikut data perhitungan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013-2020:

Tabel 4.4. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013-2020

Tahun	Retribusi Daerah	Total Pendapatan Daerah	%
2013	73.636.737.984	1.574.372.008.958	4,67
2014	77.167.650.951	1.757.697.381.840	4,39
2015	46.219.894.849	1.913.210.404.036	2,41
2016	62.727.631.456	2.152.370.082.886	2,91
2017	49.043.299.929	2.289.359.362.675	2,14
2018	48.418.070.315	2.328.703.432.669	2,08
2019	51.362.153.192	2.559.857.207.794	2,01
2020	35.010.375.259	2.428.579.503.649	1,44

Sumber : djpk kemenkeu (Data Diolah)



Gambar 4.3. Grafik Rasio Retribusi Daerah

4.2.1.4. Dana Perimbangan

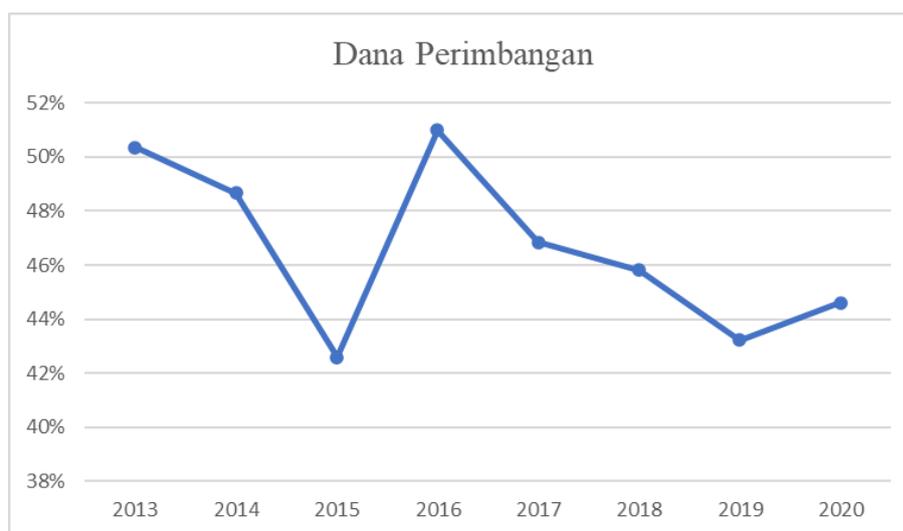
Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk pembiayaan kebutuhan daerah guna keberlangsungan pembangunan daerah, pertumbuhan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dana perimbangan diukur dari realisasi Dana perimbangan dibagi dengan realisasi pendapatan daerah. Data yang digunakan berupa Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bogor. Berikut data perhitungan Dana perimbangan Tahun Anggaran 2013-2020:

Tabel 4.5. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013-2020

Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	%
2013	792.975.350.762	1.574.372.008.958	50,36
2014	855.645.928.015	1.757.697.381.840	48,67
2015	814.953.434.916	1.913.210.404.036	42,59
2016	1.097.614.311.436	2.152.370.082.886	51,00
2017	1.072.486.473.770	2.289.359.362.675	46,85
2018	1.066.762.734.201	2.328.703.432.669	45,81
2019	1.106.494.405.814	2.559.857.207.794	43,22
2020	1.083.171.964.899	2.428.579.503.649	44,60

Sumber : djpk kemenkeu (Data Diolah)



Gambar 4.4. Grafik Rasio Dana Perimbangan

4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independent yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Data-data yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai variabel berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution*

(SPSS) for Windows Version 25. Diperoleh hasil perhitungan dengan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD_X1	8	20.82	26.93	23.0485	2.27648
RD_X2	8	1.44	4.67	2.7567	1.17123
DP_X3	8	42.59	51.00	46.6372	3.15971
KK_Y	8	29.51	42.72	35.8987	4.57172
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Data sekunder (diolah)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6., statistik deskriptif di atas dapat diketahui kondisi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan selama periode pengamatan (2013-2020). Terkait PD_X1 atau Pajak Daerah, dari 8 periode sampel pengamatan, dapat diketahui bahwa pajak daerah pemerintah Kota Bogor nilai terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu 20,82% hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp398.435.398.328,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.913.210.404.03,00 maka dapat dikatakan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak pada tahun 2015 di Kota Bogor masih rendah. Sedangkan pajak daerah tertinggi memiliki nilai 26,93% atau sebesar Rp689.543.006.040,00 dari total pendapatan daerah Rp2.559.857.207.794,00 yaitu pada tahun 2019 maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 partisipasi masyarakat dalam membayar pajak termasuk tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka menunjukkan bahwa nilai rata-rata Pajak daerah periode anggaran 2013-2020 memiliki nilai 23,04%. Dengan standar deviasi 2,27648 atau sebesar 2,27%.

Terkait dengan RD_X2 atau Retribusi Daerah, berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai terendah retribusi daerah Kota Bogor terdapat pada tahun 2020 yaitu 1,44% atau sebesar Rp35.010.375.259,00 dari total pendapatan daerah Rp2.428.579.503.649,00 dan retribusi daerah tertinggi 4,67% atau sebesar Rp73.636.737.984,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.574.372.008.958,00 yaitu pada tahun 2013. Nilai rata-rata variabel retribusi daerah sebesar 2,75% dengan standar deviasi sebesar 1,17123 atau 1,17%.

Terkait dengan DP_X3 atau Dana Perimbangan, berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai terendah dana perimbangan kota bogor terdapat pada tahun 2015 yaitu 42,59% atau sebesar Rp814.953.434.916,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.913.210.404.036,00 dan dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 51,00% atau sebesar Rp1.097.614.311.436,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.152.370.082.886,00. Nilai rata-rata variabel dana perimbangan sebesar 46,63% dengan standar deviasi 3,15%.

Terkait dengan KK_Y atau Kinerja Keuangan berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai terendah kinerja keuangan pemerintah kota Bogor terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 29,51%, pada tahun ini kinerja keuangan dikategorikan dalam kondisi sedang. Dan kinerja keuangan pemerintah kota Bogor tertinggi sebesar 42,72% yaitu pada tahun 2017, pada tahun ini kinerja keuangan pemerintah kota Bogor dapat dikategorikan dalam kondisi baik. Nilai rata-rata variabel kinerja keuangan pemerintah kota Bogor sebesar 35,89%, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan pemerintah kota Bogor dapat dikategorikan dalam kondisi cukup dengan presentase kinerja keuangan di antara 30,01%-40,00%. Dengan standar deviasi sebesar 4,57.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui hasil uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sehingga dapat memastikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas atau tidak ada gangguan normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini, menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-smirnov test* dengan dua dasar dalam pengambilan keputusan yaitu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi berada lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut bersifat distribusi tidak normal.

Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		8	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.58022209	
Most Extreme Differences	Absolute	.327	
	Positive	.327	
	Negative	-.261	
Test Statistic		.327	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.012 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.288 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.276
		Upper Bound	.299

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal yang ditunjukkan nilai signifikansi pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* terlihat bahwa pada kolom *Monte Carlo Sig (2-tailed)*

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 ($0,288 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan data terdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel (independen).

Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.984	16.890		-.177	.868		
	PD_X1	1.038	.376	.517	2.758	.051	.851	1.176
	RD_X2	-3.146	1.004	-.806	-3.135	.035	.452	2.213
	DP_X3	.507	.352	.350	1.438	.224	.503	1.987

a. Dependent Variable: KK_Y

Sumber: Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.6. dapat diketahui bahwa seluruh variabel independent mempunyai nilai VIF hitung ≤ 10 atau nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel independent dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolonieritas atau terbebas dari multikolonieritas.

4.2.3.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Run test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis), jika probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi atau data bersifat acak dan jika probabilitas $< 0,05$ maka adanya autokorelasi atau data bersifat tidak acak (Ghozali, 2018).

Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.85720
Cases < Test Value	4
Cases \geq Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	4
Z	-.382
Asymp. Sig. (2-tailed)	.703

a. Median

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji runs test tabel 4.9. dapat diketahui bahwa Asymp. Sig dua sisi adalah 0,703 atau probabilitas di atas 0,05 ($0,703 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadinya autokorelasi antar nilai residual, atau tidak ada pola tertentu antar variabel.

4.2.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik tidak terjadinya heteroskedastisitas, pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji spearman rho. Dalam dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan Spearman rho adalah jika signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat gejala heteroskedastisitas

Tabel 4.10. Hasil Uji Spearman Rho

		Correlations				
		PD_X1	RD_X2	DP_X3	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	PD_X1	Correlation Coefficient	1.000	-.262	.119	-.238
		Sig. (2-tailed)	.	.531	.779	.570
		N	8	8	8	8
	RD_X2	Correlation Coefficient	-.262	1.000	.667	.286
		Sig. (2-tailed)	.531	.	.071	.493
		N	8	8	8	8
	DP_X3	Correlation Coefficient	.119	.667	1.000	-.143
		Sig. (2-tailed)	.779	.071	.	.736
		N	8	8	8	8
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.238	.286	-.143	1.000
		Sig. (2-tailed)	.570	.493	.736	.
		N	8	8	8	8

Sumber : Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Pada gambar 4.1. yaitu uji spearman rho dalam penelitian ini menunjukkan bahwa. Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dari variabel PD_X1 sebesar 0,570, yang artinya $0,570 > 0,05$. Nilai signifikansi dari variabel RD_X2 sebesar 0,493, yang artinya $0,493 > 0,05$. Nilai signifikansi variabel DP_X3 sebesar 0,736, yang artinya $0,736 > 0,05$. Dengan kata lain nilai dari variabel PD_X1, RD_X2, dan DP_X3 nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas..

4.2.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dipakai guna mengetahui bagaimana variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, analisis regresi berganda pada penelitian ini untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan selaku variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien ini

diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.984	16.890		-.177	.868
	PD_X1	1.038	.376	.517	2.758	.051
	RD_X2	-3.146	1.004	-.806	-3.135	.035
	DP_X3	.507	.352	.350	1.438	.224

a. Dependent Variable: KK_Y

Sumber : Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji *coefficients* dapat disajikan rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$KKPD = -2,984 + 1,038PD - 3,146RD + 0,507DP + e$$

Keterangan:

KKPD : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

DP : Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar (2,984). Menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah (PD_X1), Retribusi Daerah (RD_X2) dan Dana Perimbangan (DP_X3) bernilai 0 atau konstan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) nilainya sebesar (2,984).

Nilai Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (PD_X1) sebesar 1,038, menunjukkan bahwa apabila mengalami kenaikan satu satuan pada variabel Pajak Daerah (PD_X1) maka akan ada peningkatan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar 1,038satuan dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap.

Nilai Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (RD_X2) sebesar (3,146), menunjukkan bahwa apabila mengalami kenaikan satu satuan pada variabel Retribusi Daerah (RD_X2) maka akan menurunkan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar (3,146)satuan dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap.

Nilai Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP_X3) sebesar 0,507, menunjukkan bahwa apabila mengalami kenaikan satu satuan pada Dana Perimbangan (DP_X3) maka akan ada peningkatan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar 0,507 satuan dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap.

4.2.5. Uji Hipotesis

4.2.5.1. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t dipakai guna memahami apakah variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan yang digunakan dapat mempunyai pengaruh pada variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.12. Hasil Uji t (Uji parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.984	16.890		-.177	.868
	PD_X1	1.038	.376	.517	2.758	.051
	RD_X2	-3.146	1.004	-.806	-3.135	.035
	DP_X3	.507	.352	.350	1.438	.224

a. Dependent Variable: KK_Y

Sumber: Data diolah dari SPSS ver 25.

Berdasarkan tabel 4.9. di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah (PD_X1) memiliki t_{hitung} sebesar 2,758 sedangkan t_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,776, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,051 lebih besar dibandingkan dengan taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Nilai t_{hitung} untuk Retribusi Daerah sebesar 3,135 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,776, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,035 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a2} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Nilai t_{hitung} untuk Dana Perimbangan sebesar 1,438 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,776, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,224 nilainya lebih besar dibandingkan dengan taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_{a3} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa

secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

4.2.5.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel depende, jika signifikansi $< 0,05$ maka variabel x berpengaruh pada variabel Y.

Tabel 4.13. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	128.824	3	42.941	9.827	.026 ^b
	Residual	17.480	4	4.370		
	Total	146.304	7			

a. Dependent Variable: KK_Y

b. Predictors: (Constant), DP_X3, PD_X1, RD_X2

Sumber: Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.10. diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,827 dengan nilai probabilitas (sig.) 0,026. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Maka dari itu dapat disimpulkan dari berbagai hipotesis yang diajukan yakni:

Tabel 4.14. Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Keterangan
H1	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun anggaran 2013-2020	Diterima
H2	Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun anggaran 2013-2020	Diterima
H3	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun anggaran 2013-2020	Ditolak
H4	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun anggaran 2013-2020	Diterima

4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar peranan atau kemampuan variabel independent (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan).

Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.881	.791	2.09044

a. Predictors: (Constant), DP_X3, PD_X1, RD_X2

Sumber : Data diolah dari SPSS ver 25, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11. dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R*² sebesar 0,791 . Hal ini menunjukkan bahwa 79,1% variasi variabel dependen kinerja keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan), sedangkan sisanya 20,9% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil Analisa yang telah dilakukan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian adalah untuk menguji apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial (uji t) didapatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,758 dengan nilai signifikansi 0,051 ($0,051 > 0,05$) maka pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfarisi (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wiguna & Jati (2019) dan A'mada dkk (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penerimaan pajak daerah cenderung meningkat tiap tahunnya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 memiliki pajak daerah yang meningkat setiap tahunnya dari 20,82% terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 sebesar 24,26% lebih besar dari rata-rata yaitu sebesar 23,04% dan peningkatan pajak daerah diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan daerah dari 32,80% menjadi 42,72% yang masuk ke skala 30,01%-40,00% sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan daerah

termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pajak daerah maka akan diikuti oleh tingginya kinerja keuangan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dari pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi paling tinggi, sehingga apabila pajak daerah mengalami peningkatan maka semakin meningkat pula kinerja keuangannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Florida (2007) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja ini dapat dilihat dari sasaran yang telah tercapai dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti pajak hotel, iklan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu komponen penting dan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Dan pemerintah daerah perlu menjaga kestabilan penerimaan pajak tersebut (Mahmudi, 2012). Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dan menjadi salah satu indikator untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian adalah untuk menguji apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial (uji t) didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} sebesar (3,135) dengan nilai signifikansi 0,035 ($0,035 > 0,05$) maka retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rukmana (2013) dan Wiguna & Jati (2019) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting dalam PAD, dan menjadi salah satu indikator untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan Retribusi daerah periode anggaran 2013 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan Retribusi daerah masih rendah kontribusinya untuk PAD seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.4. penerimaan retribusi daerah masih terhitung rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, oleh karena itu dalam penelitian ini menunjukkan kenaikan retribusi daerah, maka mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. pemerintah daerah kurang mampu untuk menggali sumber-sumber penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini sejalan dengan Apridiyanti (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi retribusi daerah maka akan menurunkan kinerja keuangan.

Perbedaan hasil kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah objek dan periode penelitian.

4.3.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial (uji t) didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,438 dengan nilai signifikansi 0,224 ($0,224 > 0,05$) maka dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alfarisi (2015) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggreni & Artini (2019) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Dana perimbangan Kota Bogor tahun 2018 dan 2019 memiliki dana perimbangan sebesar Rp1.066.762.734.201,00 dan Rp1.106.494.405.814,00. Dengan adanya peningkatan dana perimbangan nyata kinerja keuangan pemerintah kota bogor yang diperoleh pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 39,68% yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 39,17%. Nyatanya dana perimbangan yang meningkat tidak menjamin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan dalam teori keagenan menggambarkan pemerintah pusat mempercayakan kepada agen yaitu pemerintah daerah dalam pengelolaan dana yang dialokasikan ke daerah untuk melakukan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan yang menyeluruh, dan pemerintah daerah perlu menyajikan laporan sebagai gambaran bahwa dana diterima dan dikelola dengan baik hingga akhirnya akan mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah belum mampu mengelola secara maksimal dana transfer dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah,.

Hubungan yang tidak signifikan juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut berimbas pada alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah yang bertujuan menjembatani celah fiskal belum dapat digunakan dengan baik. Dana transfer dari pemerintah pusat sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, Hampir 50% total belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai, akibatnya dana untuk

pelayanan publik menjadi lebih sedikit sehingga membuat ketidakefektifan dalam penggunaan belanja daerah.

4.3.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh secara Bersama-sama (simultan) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Setelah dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji f) didapatkan hasil bahwa nilai f_{hitung} sebesar 9,827 dengan nilai signifikansi 0,026 ($0,026 > 0,05$) maka pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Sehingga dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan selama Tahun anggaran 2013-2020.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor . hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,758 dengan nilai signifikansi 0,051 lebih besar dari 0,05 ($0,515 > 0,05$). Dengan demikian hasil tersebut membuktikan hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka Setiap peningkatan Pajak Daerah meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor. Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti pajak hotel, iklan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu komponen penting dan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya sehingga dapat mendorong kinerja keuangan daerah tersebut.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor . hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar (3,135) dengan nilai signifikansi 0,035 lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$). Dengan demikian hasil tersebut membuktikan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Maka setiap peningkatan Retribusi Daerah menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor. Penerimaan retribusi daerah masih terhutang rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, oleh karena itu dalam penelitian ini menunjukkan kenaikan retribusi daerah, maka mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor . hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,438 dengan nilai signifikansi 0,224 lebih besar dari 0,05 ($0,224 > 0,05$). Dengan demikian hasil tersebut membuktikan hipotesis H_0 diterima dan H_3 ditolak. Maka setiap peningkatan dan penurunan Dana Perimbangan tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah belum mampu mengelola secara maksimal dana transfer dari pemerintah pusat.
4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor . hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 9,827 dengan nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05 ($0,026 < 0,05$). Dengan demikian hasil tersebut membuktikan H_0 ditolak dan H_4 diterima. Maka secara bersama-sama

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasar pada keterbatasan-keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Kegunaan Akademis

1. Pada penelitian ini bersifat *time series* dengan periode penelitian hanya 7 tahun. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan jangka periode lebih panjang sehingga diharapkan hasilnya benar-benar mempresentasikan kinerja keuangan dengan baik.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan lingkup wilayah Kota Bogor, peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian dengan menggunakan lingkup Provinsi.

5.2.2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah daerah Kota Bogor, perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan dilakukannya intensifikasi dan eksetenfikasi pajak daerah atau PAD. Eksetenfikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar. Dengan harapan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan dengan lebih baik. Dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari faktor-faktor PAD lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). . *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* .
- Anggreni, N. A., & Artini, L. G. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bal. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 1316-1345.
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri, Vol. 4 No. 3*, 32-41.
- Bahri, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* . Kota Bandung : Penerbit Media Sains Indonesia.
- BPK RI. (2017). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. [Peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/> [Diakses pada 20 Januari 2022]
- BPK RI. (2017). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. [Peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/> [Diakses pada 25 Januari 2022]
- BPK RI. (2017). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. [Peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/> [Diakses pada 20 Januari 2022]
- Fernandes, J., & Hilwani, A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal JIPS(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), Vol. 5 No. 2 (E-ISSN : 2597-6540)*, p 15-25.
- Fitriyanti, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Periode 2010-2014. *Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji* , 1-19.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H, S. A. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empirin Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat). *Fakultas Ekonomi Universita Negeri Padang*.

- Halim, A., & Maria, E. (2020). *Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN yogyakarta.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaludin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1* (ISSN 2302-0164), 15-29.
- Kisra, J. (2014). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Angan Raya. *E- Journal Repository Utu*, 46.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi .
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi .
- Muhayanah, F. A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013.
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *jurnal umrah*, p 1-15.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 3, No 1*, 1-11.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon* , Vol.3 No.1, 679-692.
- Sari, R. N. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. *Simki-Economic, Vol. 01 No. 11*, 2-11.

- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi, Vol. 28.1*, p 85-108.
- Wulandari, F., Asrizal, & Jolianis. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). *Pendidikan Ekonomi, 14*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkiadinda Chinta Cheppy Putri
Alamat : Bogor Raya Permai Blok FD7 No.17/16113
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 10 Juni 2000
Agama : Islam
Pendidikan :
1. SD : SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor
2. SMP : SMP Negeri 3 Kota Bogor
3. SMA : MA Negeri 1 Kota Bogor
4. Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 28 Juli 2022

Peneliti,

(Rizkiadinda Chinta C.P)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Periode 2013-2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1,574,372,008,958	1,757,697,381,840	1,913,210,404,036	2,152,370,082,886	2,289,359,362,675	2,328,703,432,669	2,559,857,207,794	2,428,579,503,649
Pendapatan Asli Daerah	464,695,880,485	544,835,708,254	627,597,050,141	783,873,587,219	978,197,741,947	912,197,971,289	1,015,884,216,920	872,017,242,152
Hasil Pajak Daerah	341,419,704,885	376,487,551,008	398,435,398,328	492,138,653,391	555,475,409,588	592,978,746,862	689,543,006,040	509,039,468,746
Hasil Retribusi Daerah	73,636,737,984	77,167,650,951	46,219,894,849	62,727,631,456	49,043,299,929	48,418,070,315	51,362,153,192	35,010,375,259
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,568,717,822	23,681,532,602	28,807,740,268	33,107,211,225	29,949,487,128	26,772,427,406	28,241,844,911	31,927,293,792
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30,070,719,794	67,498,973,693	154,134,016,696	195,900,091,147	343,729,545,302	244,028,726,706	246,737,212,777	296,040,104,355
Dana Perimbangan	792,975,350,762	855,645,928,015	814,953,434,916	1,097,614,311,436	1,072,486,473,770	1,066,762,734,201	1,106,494,405,814	1,083,171,964,899
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86,786,928,762	89,831,370,015	68,503,716,916	96,843,148,408	90,543,462,995	94,958,394,936	77,654,424,279	125,014,721,701
Dana Alokasi Umum	686,520,759,000	732,337,058,000	737,833,158,000	806,089,544,000	791,929,143,000	791,929,143,000	838,948,449,000	7.62556E+11
Dana Alokasi Khusus	19,667,663,000	33,477,500,000	8,616,560,000	194,681,619,028	190,013,867,775	179,875,196,265	189,891,532,535	195,601,128,198
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	316,700,777,711	357,215,745,571	470,659,918,979	270,882,184,231	238,675,146,958	349,742,727,179	437,478,585,060	473,390,296,598
Pendapatan Hibah	-	1,034,000,000	4,875,000,000	14,106,000,000	9,000,000,000	87,142,218,371	88,328,640,000	141,063,595,101
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	134,389,347,435	175,444,557,860	200,623,100,069	199,830,168,384	221,019,088,491	236,569,329,408	252,139,954,160	222,967,276,647
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	154,905,086,000	157,301,111,000	202,799,344,000	-	-	-	41,073,011,000	28,928,586,000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	26,031,179,400	55,936,979,900	80,430,838,850
Pendapatan Lain-Lain	27,406,344,276	23,436,076,711	62,362,474,910	56,946,015,847	8,656,058,467	-	-	-
Belanja Daerah	1,422,132,371,106	1,702,962,476,448	1,862,982,871,234	2,115,296,888,270	2,245,590,002,914	2,406,586,936,843	2,528,443,956,613	2,354,870,702,982
Belanja Tidak Langsung	848,278,319,099	903,875,912,745	1,038,002,595,028	1,079,712,582,079	1,145,640,306,135	1,278,330,174,926	1,080,707,776,909	1,172,482,164,991
Belanja Pegawai	754,650,690,499	850,211,145,670	956,968,389,834	1,044,030,978,405	1,030,115,640,840	1,108,690,038,689	946,231,166,393	902,722,166,877
Belanja Bunga	993,071,158	352,457,562	2,415,905,429	2,646,198,572	5,685,279,325	6,598,058,978	6,578,046,142	5,427,749,091
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	66,125,573,760	35,272,291,000	42,891,089,240	26,636,028,500	75,813,412,400	118,993,313,285	79,149,334,000	93,233,837,587
Belanja Bantuan Sosial	22,061,276,246	14,654,510,975	30,872,505,105	29,748,900,000	28,383,948,000	38,774,816,900	46,743,921,755	43,686,702,506
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	854,910,327	852,232,538	999,621,220	999,621,220	3,371,939,614	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	3,716,867,124	1,995,853,019	1,134,531,000
Belanja Tidak Terduga	3,592,797,109	2,533,275,000	3,855,084,200	5,370,006,482	2,270,085,956	1,557,079,950	9,455,600	126,277,177,930
Belanja Langsung	573,854,052,007	799,086,563,703	824,980,276,206	1,035,584,306,191	1,099,949,696,778	1,128,256,761,917	1,447,736,179,704	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	235,658,195,436	1,182,388,537,991
Belanja Barang dan Jasa	349,545,992,987	299,750,681,278	384,060,724,979	483,099,789,155	666,457,980,054	672,795,038,324	711,101,422,815	107,389,674,312
Belanja Modal	224,308,059,020	499,335,882,425	440,919,551,227	552,484,517,036	433,491,716,724	455,461,723,593	500,976,561,453	798,841,580,650
SURPLUS/DEFISIT	152,239,637,852	245,970,000,922	50,227,532,802	37,073,194,616	43,769,359,762	77,883,504,174	-	276,157,283,029
Pembiayaan Daerah	142,006,272,102	302,181,957,954	289,347,748,153	267,743,943,600	286,519,186,216	334,448,086,878	246,306,520,998	253,792,375,573

Penerimaan Pembiayaan Daerah	197,938,800,162	294,245,909,954	301,204,906,314	340,597,623,600	305,753,186,216	388,671,502,467	401,802,129,831	334,337,716,975
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	167,060,005,481	-	300,704,906,314	339,661,575,600	304,817,138,216	330,288,545,978	256,564,582,704	277,640,687,080
Pencairan Dana Cadangan	30,407,146,681	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	936,048,000	-	-	-	55,640,573,400	139,752,780,949	32,159,096,032
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	471,648,000	56,211,957,032	500,000,000	936,048,000	936,048,000	2,742,383,089		-
Penerimaan piutang daerah		-	11,857,158,161				5,484,766,178	24,537,933,863
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		54,934,179,256	-					-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55,932,528,060	777,777,776	10,921,110,161	72,853,680,000	19,234,000,000	54,223,415,589	155,495,608,833	-
Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000	500,000,000	-	-	-	-		80,545,341,402
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	44,310,640,294	-	936,048,000	71,917,632,000	19,234,000,000	8,700,000,000	16,000,000,000	0
Pembayaran Pokok Utang	5,685,839,766		-	-	-	45,523,415,589	139,495,608,833	24,300,000,000
Pemberian Pinjaman Daerah	936,048,000		339,575,280,955	936,048,000	-	-		56,245,341,402
Pembayaran Kegiatan Lanjutan				-	-	-		-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-			-	-	-		-
Lainnya								-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	294,245,909,954			304,817,138,216	330,288,545,978	256,564,582,704		-

Lampiran 2 Perhitungan pengukuran Kinerja Keuangan dengan Rasio keuangan Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi
2013	464.695.880.485	1.574.372.008.958	29,51%
2014	544.835.708.254	1.757.697.381.840	30,99%
2015	627.597.050.141	1.913.210.404.036	32,80%
2016	783.873.587.219	2.152.370.082.886	36,41 %
2017	978.197.741.947	2.289.359.362.675	42,72 %
2018	912.197.971.289	2.328.703.432.669	39,17 %
2019	1.015.884.216.920	2.559.857.207.794	39,68 %
2020	872.017.242.152	2.428.579.503.649	35,91 %